

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS
SENGKETA HARTA BAWAAN (Studi Analisis Perkara Nomor
0046/Pdt.G/2016/PA.Prm PA Pariaman dan PTA Padang
Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Keluarga (HK)



Oleh :

SOFFIYA ANDRIANI

1413010188

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2018 M / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama: **SOFFIYA ANDRIANI, BP. 1413010188** dengan judul skripsi: "**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS SENGKETA HARTA BAWAAN (Studi Analisis Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm di Pengadilan Agama Parlamen dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg di Pengadilan Tinggi Agama Padang**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 13 Agustus 2018

Pembimbing I



M. Yenis, SH., M.Pd., MH
NIP. 19601019 199803 1 001

Pembimbing II



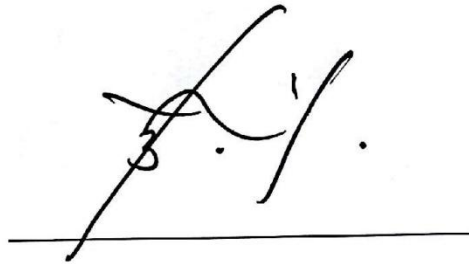
Isnaini, S.H.I., MA
NIP. 19800930 201503 1003

HALAMAN PENGESAHAN

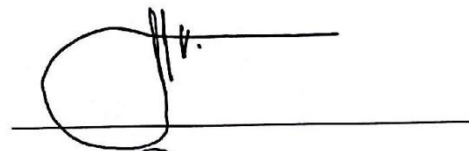
Naskah skripsi dengan judul "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Harta Bawaan (Studi Analisis Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg)", yang disusun oleh SOFFIYA ANDRIANI NIM 1413010188 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 21 Agustus 2018
TIM Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP: 19750403 200212 20001
Penguji I



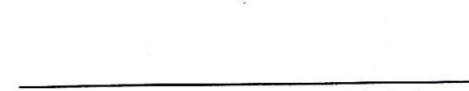
Zulfan, SHI., MH
NIP: 18791019 200710 1002
Penguji II



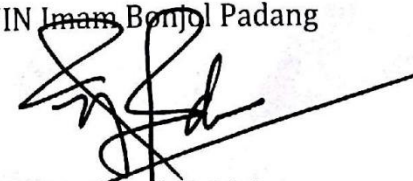
M. Yenis, SH., M.Pd., MH
NIP: 19601019 199803 1 001
Penguji III / Pembimbing I



Isnaini, S.H.I., M.A
NIP: 19800930 201503 1 003
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Eirinaldi, M.Ag.
NIP19740719 199803 1 001

24/9

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 04 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



SOFFIYA ANDRIANI

NIM: 1413010188

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Harta Bawaan (Studi Analisis Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm di Pengadilan Agama Pariaman dan Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg di Pengadilan Tinggi Agama Padang)”** ditulis oleh **Soffiya Andriani NIM 1413010188**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah penyelesaian masalah harta merupakan kewenangan Pengadilan Agama, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35-37, harta bawaan atau surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tergolong kepada harta dalam perkawinan. Dalam penyelesaian pengembalian surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi pada perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm Pengadilan Agama Pariaman menyatakan bukan wewenang Pengadilan, sedangkan dalam perkara banding Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan penyelesaian surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama. Pertanyaan penelitian yaitu *Pertama*, apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pariaman menolak permohonan tentang harta bawaan dalam putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm. *Kedua*, apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima permohonan tentang harta bawaan dalam putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Prm dan Nomor 0039/Pdt.G/2016/PTA.Pdg. Menjawab persoalan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik analisis atau Pengolahan Data bahan yang digunakan adalah analisis secara *Conten Analysis* (kajian isi). Temuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, hakim Pengadilan Agama Pariaman merujuk kepada fakta hukum pada pembuktian dalam proses persidangan, para pihak tidak dapat memberikan alat bukti yang jelas dan kurang kuatnya keterangan saksi. *Kedua*, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan penyelesaian surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan pada KHI pasal 85 ayat (1),(2), Pasal 87 dan pasal 90. *Ketiga*, Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian permasalahan harta dalam perkawinan termasuk kepada kewenangan absolut atau kekuasaan mutlak. Maka dari itu surat-surat penting/dokumen-dokumen pribadi tersebut termasuk kepada harta bawaan dari pihak suami. Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kata kunci: Kewenangan Pengadilan Agama, Harta Bawaan.